

**KEABSAHAN PELELANGAN BARANG RAMPASAN  
NEGARA YANG MASIH MEMPUNYAI IKATAN JAMINAN  
KREDIT YANG DILEKATI DENGAN FIDUSIA DITINJAU  
DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI  
INDONESIA**



**DISUSUN OLEH :**

**ANTONIUS SEPSIA MELANDO**

**NPM. 21611100027**

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

**FAKULTAS HUKUM**

**TULUNGAGUNG**

**2025**

**KEABSAHAN PELELANGAN BARANG RAMPASAN  
NEGARA YANG MASIH MEMPUNYAI IKATAN JAMINAN  
KREDIT YANG DILEKATI DENGAN FIDUSIA DITINJAU  
DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu  
Hukum Pada Universitas Tulungagung**



**Disusun Oleh :**

**ANTONIUS SEPSIA MELANDO**

**NPM. 21611100027**

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

**FAKULTAS HUKUM**

**TULUNGAGUNG**

**2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEABSAHAN PELELANGAN BARANG RAMPASAN  
NEGARA YANG MASIH MEMPUNYAI IKATAN JAMINAN  
KREDIT YANG DILEKATI DENGAN FIDUSIA DITINJAU  
DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum

Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

**Antonius Sepsia Melando**

**NPM. 21611100027**

Telah Disetujui Oleh :

Tanggal

Tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Surjanti, SH.,MH.  
NIDN. 0714076401

Retno Sari Dewi,SH.,MH.  
NIDN. 730078401

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**KEABSAHAN PELELANGAN BARANG RAMPASAN  
NEGARA YANG MASIH MEMPUYAI IKATAN JAMINAN  
KREDIT YANG DILEKATI DENGAN FIDUSIA DITINJAU  
DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

**ANTONIUS SEPSIA MELANDO**

**NPM. 21611100027**

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**(Surjanti,SH.,MH)**  
**NIDN. 0714076401**

**(Retno Sari Dewi,SH.,MH)**  
**NIDN. 730078401**

Mengetahui,  
Dekan,

**(Surjanti,SH.,MH)**  
**NIDN. 0714076401**

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**KEABSAHAN PELELANGAN BARANG RAMPASAN  
NEGARA YANG MASIH MEMPUYAI IKATAN JAMINAN  
KREDIT YANG DILEKATI DENGAN FIDUSIA DITINJAU  
DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI  
INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**ANTONIUS SEPSIA MELANDO**

**NPM. 21611100027**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

- |                            |                |       |
|----------------------------|----------------|-------|
| 1. Surjanti,SH.,MH.        | ( Ketua )      | ..... |
| 2. Retno Sari Dewi,SH.,MH  | ( Sekretaris ) | ..... |
| 3. Erly Pangestuti, SH.,MH | ( Anggota )    | ..... |

Mengetahui,  
Dekan,

**(Surjanti,SH.,MH)**  
**NIDN. 0714076401**

## SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Antonius Sepsia Melando  
Tempat dan Tanggal Lahir : Trenggalek. 29 Januari 2003  
N.P.M : 21611100027  
Prodi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah / Skripsi yang saya tulis dengan Judul : **“Keabsahan Pelelangan Barang Rampasan Negara Yang Masih Mempunyai Ikatan Jaminan Kredit Yang Dilekati Dengan Fidusia Ditinjau Dari Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia”**

Adalah benar – benar hasil tulisan/penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi

Apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 27 ayat 2 dan pasal 70)

Tulungagung,

**(ANTONIUS SEPSIA MELANDO)**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami haturkan Kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang selalu menyertai setiap langkah proses penyelesaian penyusunan dan penulisan skripsi ini, sehingga penulis boleh menyelesaikan skripsi dengan judul “Keabsahan Pelelangan Barang Rampasan Negara Yang Masih Mempunyai Ikatan Jaminan Kredit Yang Dilekati Dengan Fidusia Ditinjau Dari Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia” dengan baik. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan dan maksud untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.

Penyusunan dan Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muharsono, M.Si. selaku Rektor Universitas Tulungagung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini
2. Ibu Surjanti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung dan Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi dan selama berkuliah di Fakultas Hukum ini.
3. Ibu Retno Sari Dewi, S.H, M.H. selaku Kaprodi Prodi Hukum dan Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi dan selama berkuliah di Prodi Hukum ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang juga telah memberikan ilmu, pengalaman dan inspirasi kepada kami.
5. Kedua orang tua kami tercinta Ibu Theresia Sugiriwati dan Bapak Yosep Jumadiono yang tak pernah putus doanya kepada kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kakak-kakak dan saudara-saudara kami yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada kami.
7. Tante Helena yang juga selalu memberikan dukungan dan doa kepada kami selama berkuliah hingga skripsi ini selesai.
8. Bapak Sintua dan Mbak Intan yang telah mau meluangkan waktu untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para Romo yang sedang dan pernah bertugas di Gereja Katolik Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Tulungagung yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu yang telah mau memberikan dukungan, semangat dan doanya kepada kami.
10. Para Frater yang sedang bertugas di Gereja Katolik Santa Maria Dengan Tidak Bernoda Asal Tulungagung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu telah mau memberikan dukungan semangat dan doanya kepada kami.
11. Bapak Anjar yang telah memberikan bantuan kepada kami sehingga kami dapat berkuliah di Universitas Tulungagung.
12. Teman-teman kami dari Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

13. Teman-teman kami dari Fakultas Hukum dan FKIP Pendidikan Agama Kristen Universitas HKBP Nommensen Medan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
14. Jesella Ramayanti Nainggolan, S.H. sebagai teman diskusi saya dalam membahas isu-isu hukum sehingga dapat membantu menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang juga ikut serta membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Tulungagung, ..... Juli 2025

Antonius Sepsia Melando

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam .....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi .....	v
Surat Pernyataan Originalitas.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak .....	xiii
Abstract .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
2.1 Hukum.....	18
2.2 Hukum Jaminan .....	19

2.3 Fidusia .....	20
2.4 Sita.....	22
2.5 Sita Eksekusi .....	22
2.6 Parate Eksekusi .....	23
2.7 Sita Pidana/Penyitaan.....	24
2.8 Barang Rampasan Negara .....	24
2.9 Lelang.....	27
2.10 Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	33
3.2 Fokus Penelitian .....	34
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.5 Teknik Analisa Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Dasar Hukum Pelelangan Barang Rampasan negara Yang Masih Dilekati Fidusia .....	39
4.2 Kekuatan Hukum Lelang Barang Rampasan Negara Yang di Lakukan Tanpa Adanya Identitas Barang Yang Akan diLelang, Dimana Identitas Barang Tersebut Digunakan Sebagai Jaminan dan Dilekati Fidusia .....	56

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	64
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66

## ABSTRAK

Putusan pengadilan dan akta fidusia memiliki kekuatan eksekutorial setara, memungkinkan pelaksanaan langsung tanpa proses peradilan tambahan. Sita eksekutorial dilakukan pengadilan untuk menyita aset pihak yang kalah setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Permasalahan timbul ketika barang rampasan negara dilelang, namun masih terikat jaminan fidusia. Penelitian ini membahas: (1) Apa yang menjadi dasar hukum dalam pelelangan barang rampasan negara yang masih dilekati oleh jaminan fidusia? (2) Bagaimana kekuatan hukum Lelang barang rampasan negara yang dilakukan tanpa adanya identitas barang yang akan dilelang, dimana identitas barang tersebut digunakan sebagai jaminan dan dilekati fidusia? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Landasan hukum lelang barang sitaan negara yang terikat fidusia diatur dalam PMK No. 13/PMK.06/2018, PMK No. 199/PMK.06/2022, dan Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019, yang menegaskan putusan pengadilan sebagai dasar pelaksanaan lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang tetap sah meskipun identitas barang tidak lengkap, namun berpotensi menimbulkan sengketa di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus untuk mempertegas kedudukan akta fidusia dalam konteks pelelangan barang rampasan negara.

**Kata Kunci : Fidusia, Barang Rampasan Negara, Lelang**

## **ABSTRACT**

*Court judgments and fiduciary deeds have equal executorial power, allowing for immediate enforcement without additional judicial proceedings. Executorial seizure is carried out by the court to confiscate the losing party's assets after the verdict is legally binding. Problems arise when state confiscated goods are auctioned, but are still bound by fiduciary guarantees. This research discusses: (1) What is the legal basis for the auction of state booty that is still attached by fiduciary guarantee? (2) What is the legal force of the auction of state booty carried out without the identity of the goods to be auctioned, where the identity of the goods is used as collateral and attached by fiduciary? The method used is normative legal research with a statutory approach. The legal basis for the auction of state confiscated goods bound by fiduciary is regulated in PMK No. 13/PMK.06/2018, PMK No. 199/PMK.06/2022, and AGO Regulation No. 10 of 2019, which emphasizes court decisions as the basis for conducting auctions. The results show that the auction remains valid even though the identity of the goods is incomplete, but it has the potential to cause disputes in the future. Therefore, special regulations are needed to emphasize the position of the fiduciary deed in the context of the auction of state booty.*

**Keywords: Fiduciary, State Confiscated Goods, Auction**